



**SISTEM PEMERINTAHAN PADA MASA KHULAFURASYIDDIN:
NILAI-NILAI AKHLAK KEPEMIMPINAN DAN RELEVANSINYA BAGI
KEHIDUPAN MODERN**

Lidhah Sekar Mulatsih¹, Intan Nur Azizah²

¹Universitas Islam K.H. Saifuddin Zuhri, Purwokerto, Indonesia;

email: 254110402325@mhs.uinsaizu.ac.id

²Universitas Islam K.H. Saifuddin Zuhri, Purwokerto, Indonesia; email: intannur@uinsaizu.ac.id

Keywords

*Khulafaurasyidin,
Islamic governance,
Leadership ethics,
Akhlak, Islamic
civilization*

ABSTRACT

This study examines the Islamic governance system during the Khulafaurasyidin era (632–661 CE), focusing on the moral (akhlak) values embedded in the leadership of Abu Bakar Ash-Shiddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, and Ali bin Abi Thalib. Using a qualitative library research method, this study analyzes primary sources including the Qur'an, Hadith, and classical Islamic historical texts, as well as secondary sources from relevant scientific journals and books. The findings reveal that the Khulafaurasyidin governance model was built on five core moral values: amanah (trustworthiness), adl (justice), syura (deliberation), zuhud (non-attachment to worldly power), and tawadhu (humility). Each caliph exemplified these values distinctly: Abu Bakar through his truthfulness and firmness, Umar through his strict justice and administrative innovation, Utsman through his generosity and textual preservation, and Ali through his courage and profound knowledge. These moral values are not merely historical artifacts but remain deeply relevant to contemporary Islamic leadership challenges. This study concludes that the Khulafaurasyidin model offers a comprehensive ethical framework for modern Muslim leaders, grounded in both divine revelation and prophetic tradition.

Kata Kunci:

*Khulafaurasyidin,
Pemerintahan
Islam, Etika
kepemimpinan,*

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji sistem pemerintahan Islam pada masa Khulafaurasyidin (632–661 M) dengan fokus pada nilai-nilai akhlak yang melandasi kepemimpinan Abu Bakar Ash-Shiddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif berbasis studi kepustakaan (library research), kajian ini menganalisis sumber-sumber primer meliputi Al-Qur'an, Hadis, dan kitab-kitab sejarah Islam klasik, serta sumber sekunder berupa jurnal ilmiah dan buku-buku terkait. Hasil

Akhlak, Peradaban
Islam

kajian menunjukkan bahwa model pemerintahan Khulafaurrasyidin dibangun di atas lima nilai akhlak inti, yaitu amanah, adil, syura, zuhud, dan tawadhu. Masing-masing khalifah meneladankan nilai-nilai tersebut secara khas: Abu Bakar melalui kejujuran dan keteguhan, Umar melalui keadilan tegas dan inovasi administrasi, Utsman melalui kedermawanan dan pelestarian teks Al-Qur'an, serta Ali melalui keberanian dan kedalaman ilmu. Nilai-nilai akhlak ini tidak sekadar artefak historis, melainkan tetap relevan bagi tantangan kepemimpinan Islam kontemporer. Penelitian ini menyimpulkan bahwa model Khulafaurrasyidin menawarkan kerangka etika kepemimpinan yang komprehensif bagi pemimpin Muslim modern, yang berpijak pada wahyu ilahi dan teladan kenabian.

A. Pendahuluan

Sepanjang sejarah, hubungan antara moral dan kekuasaan selalu menjadi perdebatan yang tak pernah selesai. Ada pemimpin yang lebih mengutamakan hasil daripada etika. Ada pula yang justru menjadikan nilai-nilai moral sebagai dasar dari setiap keputusannya. Islam dengan tegas mendukung yang kedua: bahwa memimpin bukan hanya soal kemampuan mengelola kekuasaan, tetapi juga soal kesiapan moral untuk mengemban amanah. Hal ini paling nyata terlihat pada masa empat puluh tahun pertama pemerintahan Islam setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, yang kita kenal sebagai era Khulafaurrasyidin.

Meski era ini hanya berlangsung sekitar tiga puluh tahun, bukan berarti pencapaiannya kecil. Justru sebaliknya, dalam waktu yang singkat itu umat Islam berhasil membangun sistem pemerintahan yang tertata, memperluas wilayah hingga keluar Jazirah Arab, menyatukan mushaf Al-Qur'an, dan tetap menjaga standar etika kepemimpinan yang tinggi. Memahami sistem pemerintahan Islam klasik ini menjadi penting, terutama sebagai panduan etika berpolitik di era modern, saat kepercayaan masyarakat terhadap pemimpinnya terus menurun di berbagai belahan dunia (Al-Mawardi, 2006).

Sejumlah peneliti sebelumnya telah mengkaji tema ini dari berbagai sudut pandang. Setiyowati et al. (2021) menemukan bahwa model kepemimpinan Khulafaurrasyidin pada dasarnya bersifat partisipatif dan mengutamakan nilai, bukan sekadar mengandalkan hierarki jabatan. Nugroho & Hamdani (2021) mengamati bagaimana nilai-nilai kepemimpinan dari tradisi kenabian berhasil diterapkan secara nyata oleh keempat khalifah. Sementara Sae pullah (2020) menegaskan bahwa di antara berbagai model pemerintahan Islam, era Khulafaurrasyidin tetap menjadi contoh yang paling autentik. Namun, kajian yang menggabungkan analisis sistem pemerintahan dengan nilai-nilai

akhlak secara menyeluruh masih jarang dilakukan dan itulah yang ingin diisi oleh artikel ini.

Keunikan kajian ini ada pada pendekatannya yang tidak memisahkan antara sistem pemerintahan dan nilai moral keduanya dilihat sebagai satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, sebagaimana yang sesungguhnya dipraktikkan oleh para khalifah. Berdasarkan tiga pertanyaan utama: (1) apa saja prinsip dasar yang menjadi fondasi pemerintahan Khulafaurrasyidin? (2) bagaimana perbedaan gaya kepemimpinan masing-masing khalifah? dan (3) apa relevansi nilai-nilai tersebut bagi tantangan pemerintahan saat ini? artikel ini berusaha menyajikan kajian yang sekaligus bersifat historis, normatif, dan kontekstual.

B. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (library research). Data dikumpulkan dari sumber-sumber primer meliputi Al-Qur'an, kitab-kitab Hadis shahih (Shahih Bukhari dan Shahih Muslim), serta kitab-kitab sejarah Islam klasik seperti Tarikh al-Khulafa karya Imam As-Suyuthi dan Al-Bidayah wa An-Nihayah karya Ibn Katsir. Sumber sekunder diperoleh dari jurnal ilmiah nasional dan internasional terindeks, serta buku-buku akademis yang relevan.

Teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif-analitis dan komparatif. Analisis deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan sistem pemerintahan dan karakteristik akhlak masing-masing khalifah, sedangkan analisis komparatif digunakan untuk membandingkan nilai-nilai akhlak antar khalifah dan relevansinya dengan konteks kepemimpinan modern. Langkah-langkah penelitian meliputi: (1) pengumpulan dan inventarisasi sumber; (2) klasifikasi data berdasarkan tema; (3) analisis dan interpretasi; serta (4) penarikan kesimpulan.

C. Hasil dan Pembahasan

Hubungan Akidah, Iman, Dan Akhlak sebagai Fondasi Kepemimpinan

Sebelum membahas sistem dan praktik pemerintahan Khulafaurrasyidin secara nyata, lebih baik terlebih dahulu memahami dasar-dasar konsep yang mendasarinya yaitu hubungan yang erat antara keyakinan, iman, dan perilaku dalam Islam. Ketiganya bukanlah gagasan yang terpisah masing-masing, melainkan satu rangkaian yang berjalan secara terorganisir dan saling memengaruhi satu sama lain. Akidah, dalam arti

akademisnya, adalah keyakinan mendasar yang terletak di dalam hati seorang Muslim tentang keesaan Allah, kenabian Nabi Muhammad SAW, serta semua pokok-pokok iman yang lainnya. Ia merupakan dasar terdalam dari seluruh aspek kehidupan seorang Muslim, termasuk dalam kehidupan sosial dan politiknya (Supiani & Barni, 2024). Dari keyakinan yang kuat, terbentuklah iman yang hidup: bukan hanya pengakuan dengan mulut, tetapi kesadaran dalam hati yang nyata, yang mendorong seseorang untuk berperilaku sesuai dengan apa yang mereka percayai. Sandres dan tim peneliti (2023) menjelaskan bahwa hubungan antara keyakinan dan sikap moral dalam Islam adalah hubungan sebab akibat. Keyakinan yang benar secara alami akan membentuk sikap moral yang baik, karena seseorang yang benar-benar percaya bahwa Allah selalu melihat dan mengetahui segala hal, akan merasa malu melakukan tindakan tidak jujur meskipun tidak ada yang mengawasi. Iman berfungsi sebagai penghubung antara akidah dan akhlak. Attaqwa et al. (2025) mengungkapkan bahwa keimanan kepada Allah tidak hanya berkaitan dengan dimensi spiritual, tetapi juga memiliki pengaruh langsung yang membentuk karakter dan perilaku individu. Semakin dalam keimanan seseorang, semakin stabil pula akhlaknya baik dalam situasi bahagia maupun sulit, serta ketika dilihat orang lain atau saat sendirian. Hal ini disebut dalam tradisi Islam sebagai ihsan: beribadah dan bersikap seakan-akan kita melihat Allah, atau jika belum mampu menyadari bahwa Allah selalu mengawasi kita.

Akhlak, sebagai puncak dari rangkaian ini, adalah manifestasi nyata dari akidah dan iman dalam kegiatan sehari-hari. Ia lebih dari sekadar kesopanan atau etika sosial biasa, melainkan sebuah karakter yang telah tertanam dalam diri sehingga seseorang berbuat baik bukan karena terpaksa atau mengharapkan pujian, melainkan karena itulah esensi dirinya yang sebenarnya. Dalam konteks Kepemimpinan yang berasal dari akidah dan iman serta akhlak yang baik inilah yang membuat seorang pemimpin benar-benar dapat dipercaya. Bukan karena ada sistem pengawasan yang ketat, tetapi karena nurani pemimpin itu sendiri yang menjadi pengawas yang paling efektif.

Benang merah ini menjelaskan mengapa para Khulafaurrasyidin mampu memimpin dengan standar akhlak yang sangat tinggi, meskipun pada masa itu belum ada sistem birokrasi modern, belum ada lembaga antikorupsi, dan belum ada mekanisme pengawasan yang formal dan canggih. Mereka memimpin dengan dasar keyakinan yang kuat, iman yang hidup, dan akhlak yang terbentuk dari bertahun-tahun belajar langsung kepada Nabi

Muhammad SAW, Ini adalah sistem terkuat yang pernah ada: seorang pemimpin yang mengawasi dirinya sendiri, bukan karena takut pada manusia, tapi karena takut kepada Allah. Hasil dan pembahasan dituliskan atau uraikan sesuai dengan konsep teori yang sudah diajukan. Tetapi juga ada temuan lain yang berbeda dengan teori yang sudah Anda ajukan silakan dituliskan.

Tiga Pilar Teologis Pemerintahan Islam

Sebelum membahas masing-masing khalifah, penting untuk dipahami bahwa sistem pemerintahan Khulafaurrasyidin tidak muncul begitu saja. Ia lahir dari keyakinan yang kuat bahwa manusia diciptakan bukan hanya untuk menjalani kehidupan, tetapi juga untuk menjadi wakil Allah di bumi dalam menegakkan kebaikan dan keadilan. Dari keyakinan inilah, tiga pilar utama pemerintahan Islam terbentuk.

Pilar pertama adalah musyawarah (syura). Dalam QS. Asy-Syura: 38 disebutkan bahwa salah satu ciri orang beriman adalah menyelesaikan urusan mereka melalui kesepakatan bersama. Ini bukan sekadar aturan teknis, melainkan gambaran tentang bagaimana seorang pemimpin seharusnya bersikap: tidak sewenang-wenang, tidak merasa paling benar, dan selalu memberi ruang bagi pendapat orang lain (Majid, 2020). Pilar kedua adalah keadilan. QS. An-Nisa: 58 menegaskan dua kewajiban pemimpin yang saling terkait: menyampaikan amanah kepada yang berhak, dan memutuskan perkara dengan adil. Keadilan di sini bukan sekadar soal keseimbangan, melainkan keberpihakan aktif pada kebenaran tanpa melihat status sosial seseorang. Pilar ketiga adalah amanah. Hadis dalam Shahih Bukhari dan Shahih Muslim menyatakan bahwa setiap pemimpin bertanggung jawab atas orang-orang yang dipimpinnya dan akan dimintai pertanggungjawaban atas hal itu. Ini berarti jabatan bukan sesuatu yang dimiliki, melainkan kepercayaan yang dititipkan dan mengkhianatinya adalah pelanggaran moral, bukan sekadar kesalahan administratif (Olifiansyah et al., 2020).

Ketiga pilar ini saling menopang satu sama lain: musyawarah memastikan proses pengambilan keputusan yang melibatkan banyak pihak, keadilan memastikan hasilnya tidak memihak kelompok tertentu, dan amanah memastikan niat pemimpin tetap tulus. Jika salah satunya hilang, maka dua yang lain pun akan kehilangan maknanya.

Abu Bakar Ash-Shiddiq (11-13 H / 632-634 M): Kepemimpinan Berbasis Kejujuran

Masa kepemimpinan Umar bin Khattab menandai era kejayaan administrasi Islam. Umar membangun sistem pemerintahan yang terorganisir dengan mendirikan diwan (lembaga-lembaga negara), membentuk sistem Baitul Mal yang lebih terstruktur, dan menetapkan kalender Hijriah. Nilai akhlak yang paling menonjol dari Umar adalah keadilan yang tegas tanpa pandang bulu. Riwayat yang masyhur menceritakan Umar yang rela diqishash jika bersalah, bahkan kepada rakyat biasa. Selain itu, Umar dikenal dengan pola hidup yang sangat sederhana dan zuhud meski negara dalam kondisi makmur. Nugroho & Hamdani (2021) mencatat bahwa nilai-nilai kepemimpinan profetik yang diinternalisasi Umar menjadi model kepemimpinan yang relevan hingga kini. Keadilan Umar bukan hanya tertulis dalam buku-buku sejarah, tetapi juga dijelaskan dalam hadis dan Al-Qur'an. Rasulullah SAW pernah berbicara bahwa salah satu dari tujuh kelompok orang yang akan mendapatkan perlindungan dari Allah pada hari kiamat adalah "pemimpin yang adil" (HR. Bukhari No.660). Umar adalah gambaran hidup dari hadis tersebut. Sementara itu, QS. Ayat Al-Maidah: 8 mengatakan bahwa benci terhadap suatu kelompok tidak boleh jadi alasan untuk tidak adil "berlaku adil lah, karena itu lebih dekat kepada ketakwaan." Prinsip ini tepat yang diterapkan oleh Umar: ia dikenal tidak membedakan siapa yang bersalah, entah itu orang biasa atau keluarga pejabat. Keadilan menurutnya adalah kewajiban yang berlaku untuk semua orang, bukan kebijakan yang bisa dipilih sesuai dengan kepentingan tertentu.

Utsman bin Affan (23-35 H / 644-656 M): Kepemimpinan Berbasis Kedermawanan

Utsman bin Affan terpilih melalui musyawarah yang dipimpin oleh Abdurrahman bin Auf. Pencapaian terbesar masa Utsman adalah kodifikasi Al-Qur'an dalam satu mushaf standar (Mushaf Utsmani), sebuah langkah monumental yang menjaga kesatuan umat Islam hingga hari ini. Akhlak kepemimpinan Utsman yang paling menonjol adalah kedermawanan (al-karam) yang luar biasa. Kedermawanan Utsman bin Affan memiliki akar yang sangat dalam bukan hanya kebiasaan, tetapi mencerminkan keyakinan bahwa harta adalah sesuatu yang dipercayakan, dan harus digunakan dengan sebaik-baiknya untuk jalan Allah. Rasulullah SAW pernah menyebut Utsman sebagai orang yang sangat murah hati di antara para sahabat (HR. Tirmidzi). Dalam Al-Qur'an, QS. Surah Al-Baqarah ayat 261 menjelaskan sebuah perumpamaan tentang seseorang yang menggunakan

hartanya untuk beramal di jalan Allah, seperti sebuah biji yang tumbuh menjadi tujuh tangkai, dan setiap tangkai itu berisi seratus biji. Ini bukan hanya tentang pahala bagi Utsman, ini adalah cara ia memandang harta: bukan untuk disimpan, tapi untuk digunakan agar manfaatnya bisa bertambah melalui kebaikan dan kedermawanan. Sejak masa Nabi SAW, Utsman telah menginfakkan hartanya dalam jumlah besar untuk kepentingan Islam, termasuk membeli Sumur Raumah untuk kepentingan umum dan membiayai sepertiga pasukan dalam Perang Tabuk (Saepullah, 2020).

Ali bin Abi Thalib (35–40 H / 656–661 M): Kepemimpinan Berbasis Keilmuan

Ali bin Abi Thalib adalah khalifah keempat yang menghadapi periode paling penuh gejolak dalam sejarah Islam awal. Ali dikenal sebagai pintu gerbang ilmu pengetahuan Islam Nabi SAW bersabda bahwa beliau adalah kota ilmu dan Ali adalah pintunya. Keilmuan dan keberanian Ali menjadi modal utama kepemimpinannya. Al-Qur'an dalam QS. Surah Al-Baqarah ayat 269 menjelaskan bahwa Allah berikan hikmah kepada orang yang Ia suka, dan barang siapa yang diberi hikmah itu, maka ia telah mendapatkan kebaikan yang banyak sekali. Dalam bidang pemerintahan, Ali berupaya menegakkan keadilan dan menghapus nepotisme. Surat-surat Ali kepada para gubernurnya, terutama kepada Malik Al-Asytar, merupakan dokumen kepemimpinan Islam yang komprehensif dan masih dikaji hingga kini (Rahman & Usman, 2020).

Nilai-Nilai Akhlak Inti dalam Sistem Pemerintahan Khulafaurasyidin

Dari analisis kepemimpinan keempat khalifah, terdapat lima nilai akhlak inti yang menjadi benang merah sistem pemerintahan Khulafaurasyidin. Pertama, amanah (kepercayaan dan tanggung jawab), yang tercermin dalam kesadaran setiap khalifah bahwa kekuasaan adalah titipan Allah SWT yang akan dipertanggungjawabkan. Kedua, adl (keadilan), sebagai nilai yang paling sering ditegaskan dalam Al-Qur'an dan paling konsisten diterapkan dalam praktik pemerintahan mereka.

Ketiga, syura (musyawarah), sebagai mekanisme pengambilan keputusan yang melibatkan para sahabat terkemuka dan mencerminkan semangat demokrasi Islam. Keempat, zuhud (tidak terikat pada kekuasaan dan kemewahan duniawi), yang terbukti dari kesederhanaan hidup seluruh khalifah meski memimpin imperium yang luas. Kelima, tawadhu (kerendahan hati), yang tercermin dalam keterbukaan mereka menerima kritik dan koreksi dari rakyat biasa sekalipun.

Relevansi bagi Kepemimpinan Islam Modern

Nilai-nilai akhlak Khulafaurrasyidin memiliki relevansi yang sangat signifikan bagi konteks kepemimpinan Islam kontemporer. Di era yang diwarnai korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, dan krisis kepercayaan publik, model kepemimpinan yang berpijak pada amanah dan keadilan menawarkan solusi substansial. Setiyowati et al. (2021) menegaskan bahwa internalisasi nilai-nilai kepemimpinan Khulafaurrasyidin dapat menjadi landasan etis bagi pemimpin Muslim masa kini. Dengan demikian, mempelajari dan mengamalkan nilai akhlak Khulafaurrasyidin bukan sekadar nostalgia historis, melainkan investasi moral yang nyata untuk masa depan kepemimpinan Islam.

D. Kesimpulan

Sistem pemerintahan Islam pada masa Khulafaurrasyidin menunjukkan bahwa kepemimpinan yang berlandaskan iman dan taqwa mampu melahirkan pemerintahan yang adil, amanah, dan mengutamakan kepentingan umat. Pemerintahan mereka dijalankan berdasarkan prinsip musyawarah, keadilan, dan tanggung jawab yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis. Meskipun setiap khalifah memiliki gaya kepemimpinan yang berbeda, seluruhnya berpegang teguh pada nilai-nilai Islam dalam menjalankan amanahnya. Keimanan yang kuat menjadi faktor utama yang membentuk akhlak dan integritas para khalifah, sehingga mereka mampu menjadi teladan dalam memimpin. Oleh karena itu, nilai-nilai kepemimpinan Khulafaurrasyidin masih relevan untuk diterapkan dalam kehidupan dan pemerintahan saat ini.

Daftar Pustaka

- Al-Bukhari, M. I. (n.d.). *Shahih al-Bukhari*. Dar Tauq al-Najah.
- Al-Mawardi, A. H. A. (2006). *Al-Ahkam al-Sultaniyyah: Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syariat Islam* (F. S. Hamdani, Trans.). Darul Falah.
- Al-Tirmidzi. (n.d.). *Sunan al-Tirmidzi*. Dar al-Gharb al-Islami.
- As-Suyuthi, J. A. (n.d.). *Tarikh al-Khulafa*. Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Attaqwa, M., Nofianto, L., & Syaifuddin, M. (2025). Urgensi iman kepada Allah dalam membentuk akidah akhlak peserta didik di era disrupsi. *Moral: Jurnal Kajian Pendidikan Islam*, 2(2), 203–211.

- Ibn Katsir, I. (2004). *Al-Bidayah wa An-Nihayah* (A. Ghazali, Trans., Vols. 3–4). Pustaka Azzam.
- Majid, Z. A. (2020). Urgensi musyawarah dalam Al-Qur'an: Kajian tafsir tematik. *Hikmah: Journal of Islamic Studies*, 15(2), 321–340.
- Muslim, I. H. (n.d.). *Shahih Muslim*. Dar Ihya' al-Turats al-'Arabi.
- Nugroho, N. A. K., & Hamdani, M. K. (2021). Internalisasi nilai-nilai kepemimpinan profetik pada masa Khulafaur Rasyidin. *TAJDID: Jurnal Pemikiran Keislaman dan Kemanusiaan*, 5(2), 139–149.
- Olifiansyah, M., Hidayat, W., Diaying, B. P., & Dzulfiqar, M. (2020). Kepemimpinan dalam perspektif Islam. *eL-HIKMAH: Jurnal Kajian dan Penelitian Pendidikan Islam*, 14(1), 98–111.
- Rahman, T., & Usman, M. (2020). Peradaban Islam pada masa Al-Khulafa Al-Rasyidin. *Jurnal Studi Islam Pancawahana*, 15(2), 111–126.
- Saepullah, S. (2020). Islam dan sistem pemerintahan dalam lintasan sejarah. *Al Qisthas: Jurnal Hukum dan Politik*, 10(2), 23–42.
- Sandres, A., Nabila, P., Juliansyah, D., & Noviani, D. (2023). Hubungan antara akidah dan akhlak dalam Islam. *Social, Educational, Learning and Language (SELL)*, 1(2), 233–238.
- Setiyowati, A., Putri, C. J., Jannah, F. M., & As'ad, M. R. (2021). Kepemimpinan Islam periode Khulafaur Rasyidin. *YASIN: Jurnal Pendidikan dan Sosial Budaya*, 1(2), 262–274.
- Supiani, A., & Barni, M. (2024). Analisis karakteristik materi PAI bidang akidah akhlak di berbagai jenjang pendidikan. *Jurnal Inovasi Pendidikan*, 6(3).